

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah “Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Lima Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”. Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan, fokus pembangunan jangka menengah periode 2016-2021 diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, yang ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah: "MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN".

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan kawasan industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek

wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan ke depan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:

- 1) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/kesehatan/ ibadah);
- 3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) keamanan, bebas dari rasa takut;
- 5) mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsepsi *livable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, yaitu:

- 1) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
- 2) mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
- 3) meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
- 4) mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; dan

5) mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
	Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;	Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (liveable city) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).
	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;	Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non motorized vehicle) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (green economy) dan berkeadilan. Pengembangan potensi bidang unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

		Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Misi jangka menengah Kota Balikpapan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana keterkaitannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan
		2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan	2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
		3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan	3 Menurunnya Jumlah Pengangguran
			4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
	Misi 2:	4 Meningkatkan kualitas	5 Meningkatkan kualitas

mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan		kota yang berwawasan lingkungan		lingkungan hidup	
			6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	
	Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif	5	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
	Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	6	Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat	8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
		7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Misi Ke - 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	

Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2. peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;
3. peningkatan produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;
6. mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
8. pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
9. mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
10. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif;
11. pengembangan potensi ekonomi lokal;
12. pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berikut ini disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan

No	Urusan	Permasalahan
1	PENDIDIKAN	Penurunan angka APK SMP
2	KESEHATAN	Peningkatan Angka Stunting
3	PEKERJAAN UMUM	Kondisi kualitas jalan
		Titik banjir dan genangan
		Cakupan pelayanan air minum
		Konektifitas kawasan strategis
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih adanya kawasan kumuh
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Angka kriminalitas yang meningkat
6	SOSIAL	Kurangnya sarana dan prasarana sosial
		Data PMKS yang belum valid
		Peningkatan jumlah jiwa penduduk miskin
7	KETENAGA KERJAAN	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
9	PANGAN	Ketersediaan pangan masih mengandalkan daerah pemasok
10	LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan indeks kualitas air dan tutupan lahan
11	PERTANAHAN	Terhambatnya Proses Pembebasan lahan di beberapa proyek strategis
12	PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA	Masih tingginya angka unmet need
		Masih terdapatnya pernikahan pada usia dini

No	Urusan	Permasalahan
		Masih rendahnya kesadaran PUS ber-KB
13	PERHUBUNGAN	Masih kurangnya sarana prasarana perhubungan
14	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintahan
15	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Keterbatasan SDM para pelaku usaha UMKM atau IKM
16	PENANAMAN MODAL	Perkembangan infrastruktur di Kawasan Industri Kariangau yang relatif lambat
17	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kewirausahaan
18	KEBUDAYAAN	Pendataan dan pelestarian cagar budaya yang belum optimal
19	PERPUSTAKAAN	Menurunnya angka kunjungan perpustakaan daerah
20	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan hasil produksi perikanan
21	PARIWISATA	Sarana prasarana wisata yang belum memadai
22	PERTANIAN	Penurunan hasil produksi pertanian dikarenakan berkurangnya luas lahan
23	PERDAGANGAN	Sarana Prasarana perdagangan (pasar) yang belum memadai

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Perluasan Lapangan Kerja;
- b. pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Adaptif terhadap Perubahan Iklim dan Berketahanan Bencana;
- c. peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berorientasi pada Konsep Hijau (*Green City*);
- d. peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Berwawasan Lingkungan (*Green Economy*); dan
- e. pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Daerah

Kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2020 merupakan upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan, tema indikatif pembangunan tahunan telah dirumuskan dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga tema pembangunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah tema indikatif yang telah dirumuskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu “PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH BIDANG DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN”



Tema pembangunan tahun 2020 ini dijabarkan menjadi 4 (empat) fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia BERDAYA SAING

Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Balikpapan agar memiliki suatu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki keunggulan ataupun kemampuan baik dari segi komparatif maupun kompetitif. Pembangunan sumber daya manusia tersebut meliputi seluruh seluruh bidang yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan serta sosial budaya.

Dalam pencapaian pembangunan pada bidang pendidikan adalah dengan mendorong Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) agar mengalami peningkatan. Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di bidang pendidikan, kualitas pendidik dan

tenaga kependidikan serta sarana-prasarana pendidikan dan komponen lainnya.

Pencapaian pembangunan pada bidang kesehatan adalah dengan mendorong Angka Harapan Hidup (AHH) agar mengalami peningkatan. Pencapaian pembangunan kesehatan tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di bidang kesehatan, sarana-prasarana kesehatan dan komponen lain yang mendukung peningkatan indeks kesehatan.

Pencapaian pembangunan pada bidang ekonomi adalah dengan mendorong paritas daya beli sehingga indeks daya beli meningkat. Pencapaian pembangunan ekonomi tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di bidang ekonomi dan bangkitan ekonomi baru.

Di sisi lain, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Kebijakan Kota Layak Anak adalah strategi dalam rangka pemenuhan hak anak di semua kluster. Peningkatan kualitas hidup anak tidak terlepas dari peran keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Kota bersama dengan masyarakat telah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota melalui kebijakan dan program yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan dukungan masyarakat serta stakeholder lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan hak anak antara lain menyusun masterplan Balikpapan menuju Kota layak Anak, membangun kelembagaan perlindungan anak sampai di tingkat Rukun Tetangga, membangun komitmen bersama dengan semua penyelenggara layanan pendidikan dan kesehatan dan rumah ibadah. Sehingga hasil yang dicapai Kota Balikpapan pada tahun 2019 adalah penghargaan KLA dengan strata Nindya.

Bidang Sosial sesuai dengan Pencapaian pembangunan bidang sosial tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial sangat diperlukan dalam membantu tugas Pemerintah Kota memberikan pelayanan dasar sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jiwa kerelawanan menjadi motor penggerak bagi Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan lainnya. Pemerintah Kota berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka dalam penanganan, penjangkauan dan pendampingan PPKS yang memerlukan pelayanan kedaruratan sosial. Selain itu sinergitas tugas dan fungsi masing-masing unsur pilar-pilar sosial dan Pemerintah Kota diperlukan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Balikpapan.

Dalam rangka pencapaian fokus pembangunan sumber daya manusia berdaya saing tersebut, maka program-program prioritas Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dasar
 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 4. Program Peningkatan Kualitas Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan
 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 9. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
-
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
- Pada sasaran pembangunan ini merupakan upaya pemantapan daya dukung seluruh bidang untuk pembangunan berkelanjutan dalam hal pencapaian tujuan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan serta mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan Kota Layak Huni, Terkemuka dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman.

Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga sejalan dengan upaya Kota Balikpapan untuk membentuk kota berkelanjutan yang berketahanan yaitu upaya untuk menciptakan kemampuan lingkungan perkotaan agar dapat mempersiapkan, menanggapi, melawan dan memulihkan diri dari ancaman bahaya yang signifikan dengan kerusakan minimum untuk keselamatan publik, kesehatan, keamanan dan ekonomi dalam waktu yang tepat dan efisien.

Permasalahan pemenuhan layanan dasar khususnya layanan akses air minum dan air limbah yang layak, permukiman kumuh, pengendalian banjir serta peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana dan kebakaran menjadi hal yang akan diprioritaskan dalam sasaran pembangunan ini. Oleh karena itu, program prioritas untuk mendukung capaian fokus pembangunan ini adalah:

1. Program Pengendalian Banjir
 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 5. Program Pembangunan Pedestrian Kota
 6. Program Peningkatan Layanan Angkutan
 7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran
 8. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui PENATAAN KAWASAN INDUSTRI serta pengembangan potensi UMKM dan EKONOMI KREATIF.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan kinerja perekonomian pada tahun 2015 yang merupakan dampak dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang sangat dipengaruhi oleh bidang migas dan batubara. Oleh karena itu kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara jangka panjang adalah melakukan transformasi ekonomi yang tidak bergantung pada bidang migas dan batu bara melalui pengembangan bidang potensial seperti pertanian dan perdagangan yang didukung oleh hilirisasi industri. Oleh sebab itu tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 menjadikan Nilai Tambah Ekonomi menjadi kata kunci Tema RKPD tahun 2020 dimana hal tersebut mencerminkan tingkat produktivitas perekonomian suatu daerah. Untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, maka perlu percepatan pengembangan pertumbuhan hilirisasi produk-produk daerah yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan. Maka perlu penguatan daya saing investasi daerah. Daya saing investasi perlu didukung oleh faktor-faktor kunci daya saing investasi yaitu menyediakan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas dan didukung oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya faktor-faktor produksi.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, salah satu kawasan strategis berdasarkan sudut pandang ekonomi adalah Kawasan Industri Kariangau yang terletak di Kota Balikpapan. Keberadaan Kawasan Industri Kariangau menjadi salah satu modal penting bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan untuk mewujudkan hilirisasi industri. Namun untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang masih ada di Kawasan Industri Kariangau khususnya mengenai belum adanya lembaga pengelolaan, infrastruktur jalan dan air bersih.

Selain itu, perkembangan Kota Balikpapan saat ini sebagai kota jasa dan MICE dengan dukungan infrastruktur yang layak dan memadai menjadi modal bagi Kota Balikpapan untuk

mengembangkan perekonomian pada bidang potensial lainnya seperti pengembangan bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu fokus pembangunan pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2020 diharapkan dapat menjaga momentum pengembangan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dapat terus terjaga.

Upaya pengembangan ekonomi kreatif ini sejalan dengan strategi Provinsi Kalimantan Timur melalui optimalisasi pengelolaan UMKM dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diantaranya melalui peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan usaha besar melalui inkubasi bisnis, fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM serta fasilitasi kewirausahaan pemuda dengan penumbuhan usaha rintisan (*startup*) industri kreatif.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 pada tahun 2020 maka fokus pembangunan kota Balikpapan yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau. Infrastruktur penunjang aksesibilitas dari dan menuju ke Kawasan Peruntukan Industri Kariangau menjadi fokus pembangunan wilayah di Kota Balikpapan guna meningkatkan daya saing investasi. Bangkitan ekonomi kawasan ini selanjutnya juga diikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan pendidikan vokasi dan balai latihan kerja. Diharapkan kedepannya tenaga kerja lokal yang ada di sekitar wilayah industri dapat memiliki kompetensi yang sesuai standar dan terserap di pasar kerja.

Oleh karena itu, sebagaimana fokus pembangunan kewilayahan dari Provinsi Kalimantan Timur yaitu berupaya meningkatkan aksesibilitas penunjang di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau, maka Pemerintah Kota Balikpapan juga memandang perlu untuk mengarahkan fokus pembangunan ke Kawasan Peruntukan Industri Kariangau guna mendukung peningkatan daya saing investasi di kawasan tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan upaya bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih,

pengelolaan listrik, dan tumpang tindih kepemilikan lahan dikawasan tersebut.

Berikut program prioritas untuk mendukung fokus pembangunan ini adalah:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4. Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Peningkatan Produksi Perikanan
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang EFEKTIF, AKUNTABEL, dan TRANSPARAN

Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (efektif), meningkatkan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat (akuntabel) dan membangun kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (transparan). Program-program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan dalam pencapaian fokus pembangunan tersebut adalah:

1. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur
2. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.



Tabel 4.4 Keterkaitan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan Sasaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
	Menurunnya Jumlah Pengangguran
	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik

4.3. Integrasi pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Berani memiliki makna bahwa Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan berdaulat memiliki makna Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan dan pelayanan

publik, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Sejalan dengan kerangka pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2020 tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi. Tema pembangunan tersebut diformulasi dengan memperhatikan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Dari hasil formulasi tersebut tema pembangunan Tahun 2020 selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 berdasarkan fokus tema pembangunan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah;
3. peningkatan kualitas daya saing infrastruktur;
4. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui reformasi birokrasi;
5. mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan.

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. pengembangan Pendidikan vokasi dan Kejuruan berbasis Teknologi;
3. penguatan peran dan Kapasitas ekonomi Kerakyatan;
4. pemerataan dan peningkatan Konektivitas pusat-pusat produksi;
5. peningkatan Ketahanan Sumberdaya air, energi dan daya dukung Lingkungan hidup;
6. peningkatan tata Kelola dan kapasitas Pemerintah daerah.

Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Keselarasan Fokus Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan Tahun 2020

Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Peningkatan Kualitas SDM melalui pembangunan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Menjaga Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah	Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif.
Peningkatan Kualitas Daya Saing Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar melalui Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan
Mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan

Berdasarkan penjabaran fokus dan prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020, maka target RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Persandingan Target Indikator Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan

No	Indikator	Target Provinsi Tahun 2020	Target Kota Tahun 2020
1	Tingkat Kemiskinan	6 %	2,31%
2	Pertumbuhan Ekonomi	2,75 – 3,25 %	5,5 – 6,0%
3	Inflasi	3,0 ± 1 %	5± 1 %
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,35 %	4,85%

4.4 Integrasi Pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam menyusun RKPD Kota Balikpapan tahun 2020, selain harus mempedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD juga berpedoman pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2020 yang mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2020, dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia;
2. Penguatan konektivitas;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air;
5. Stabilitas keamanan nasional;

Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Persandingan Fokus Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020	Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Pembangunan manusia.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Penguatan konektivitas.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif

	dan Berketahanan
Peningkatan nilai tambah ekonomi	Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air.	- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan - Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif
Stabilitas keamanan nasional.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan

Target pembangunan nasional tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan

No	Indikator	Target Nasional Tahun 2020	Target Kota Tahun 2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,5	79.53
2	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0 %	2,31%
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,5 %	5,5 – 6,0%
4	Gini Ratio	0,375 – 0,380	0,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6 – 5,1 %	4,85%

Berdasarkan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020, maka disusunlah program prioritas Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 4.9 Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Program Pendidikan Dasar
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kualitas

		Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
		Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Permukiman Yang Inklusif Dan Berketahanan	Program Pengendalian Banjir
		Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Program Pembangunan Pedestrian Kota
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3	Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Program Penataan Struktur Industri
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Program Peningkatan Produksi Perikanan
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar

4	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Transparan	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur
		Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2020

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,51
		Harapan Lama Sekolah	14.93
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	Usia Harapan Hidup	74
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.85
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.50
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	79.53
		Tingkat Kemiskinan	2.31
		Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,14
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Livable City Index	74
7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	78.00
8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Penurunan indeks Gini Ratio	0,31
		Peningkatan PDRB perkapita	Rp 124,63 (Juta)
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai PDRB Non Migas	Rp 37,48 (Triliun)
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Opini Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	6.80
		Survey Kepuasan Masyarakat	80,16

		Nilai Evaluasi LAKIP	B(71-73)
		Penilaian Kepatuhan	75
		Indeks Profesionalitas ASN	86

Tabel 4.11.
Program Prioritas RKPd Kota Balikpapan Tahun 2020

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD		
			TARGET KINERJA AWAL (2020)	Target			Target	
Bidang Pendidikan	1	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun	99,91%	Rp	14.405.656.000	99,91%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK PAUD/TV/ Sederajat	77,00%			77,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	41,36%	Rp	7.378.830.000	41,80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			SDMI/Sederajat (IPTEK)	7,11%			7,61	
			SDMI/Sederajat (IMTAQ)	100%			100%	
			APS SDMI/Sederajat	97,37%			96,37%	
			APM SDMI	98,23%			96,72%	
			APK SDMI	93,20%			93,25%	
			Angka Putus Sekolah (APS) SDMI	0,02%			0,02%	
			Angka Kelulusan (AL) SDMI	100%			100%	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SDMI ke SMP/MTs	106,44%			107,36%	
			Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SDMI Sederajat	29,00%			30,00%	
			Sekolah pendidikan SDMI kondisi bangunan baik	92,00%	Rp	152.606.436.439	95,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	22,22%			23,61	
			SMP/MTs/Sederajat (IMTAQ)	100%			100%	
			APK SMP/MTs	84,20%			84,25%	
			APM SMP/MTs	90,32%			91,23%	
			APS SMP/MTs/Sederajat	88,29%			89,29%	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,16%			0,15%	
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%			100%	
Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,87%			101,81%				
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat	20,57%			20,57%				

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Penunjang		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SMKD
			TARGET	RP		
Bidang Kesehatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	38,20%		38,40%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			93%		94%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			100%		100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			84%	Rp 1.428.460.000	86%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			74%		76%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			84%		86%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			84%		86%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			84%		86%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			98,30%	Rp 64.619.788.000	98,35%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			< 1		< 1	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
Bidang Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Prevalensi HIV dan AIDS - Menurunnya Angka Kejadian DBD - Menurunnya Prevalensi TBC	135/100.000		140/100.000	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			100%		100%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			2/1.000 KH		1/1.000 KH	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			3/1.000 KH	Rp 5.000.000.000	2/1.000 KH	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			63/100.000 KH		60/100.000 KH	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			85%		100%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%	Rp 35.084.500.000	90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Nasional presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
			80%		90%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD	
			Target Kinerja Awal (2020)	Rp.			
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengolahan Air Baku	Persentase Ketersediaan SDM Rumah Sakit	Target		90%	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang	
			85%				
			Persentase Ketersediaan SDM UPTD	85%			90%
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas	80%	90%	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang		
			Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi nasional	80%		85%	
		Perda Tata Ruang	Persentase Penyelesaian Pemertaaan Ruang	2 Perda	Rp. 15.000.000.000	3 Perda	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang
				98,40%	Rp. 1.100.000.000	98,50%	
		Cakupan Layanan Air Minum	Cakupan Layanan Air Bersih	80,20%	Rp. 21.892.354.000	80,90%	Dinas Pekerjaan Umum/PDAM
				96%	Rp. 28.940.625.000	97%	Dinas Pekerjaan Umum/PDAM
		Penyediaan Kapasitas Air Baku	Indeks Aksesibilitas	1.670 liter/detik	Rp. 67.443.585.000	1.696 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum/PDAM
				1.478	Rp. 33.959.050.000	1.492	Dinas Pekerjaan Umum
		Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia	Titik Banjir	0 unit	Rp. 45.375.000.000	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum
				40	Rp. 30.250.000.000	35	Dinas Pekerjaan Umum
% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar	46,92%	Rp. 101.874.740.000	47,86%	Dinas Pekerjaan Umum		
		28,61%	Rp. 131.090.750.000	34,12%	Dinas Pekerjaan Umum		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	80,64%	Rp. 12.400.000.000	81,14%	Dinas Pekerjaan Umum		
		87,10%	Rp. 1.226.000.000	90,32%	Dinas Pekerjaan Umum		
Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik	Peruntukan Luasan Kawasan Kumuh	262 Ha	Rp. 875.000.000	257 Ha	Dinas Perumahan dan Permukiman		
		67.558 unit	Rp. 1.226.000.000	56.299 unit	Dinas Perumahan dan Permukiman		
Program Peningkatan Backlog Perumahan	Peruntukan Rumah Tidak Layak Huni	990 unit	Rp. 29.546.789.000	975 unit	Dinas Perumahan dan Permukiman		
		95,89%	Rp. 875.000.000	98,63%	Badan Perangulangan Bencana Daerah		
Program peningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap	100%	Rp. 29.546.789.000	100%	Badan Perangulangan Bencana Daerah		

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD
			Target Kinerja Awal (2020)	Rp		
Masyarakat	24	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Target	Rp	Target	SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75%	Rp 1.575.000.000	100%	
	25	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Target	Rp	Target	
		Presentase poskarling aktif	64,01%	Rp 600.000.000	64,21%	
	26	Program Perencanaan Kartribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Target	Rp	Target	
		Penurunan Angka Kriminalitas	18%	Rp 3.400.000.000	17%	
	27	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Target	Rp	Target	
		Rasio Pelugas Limnas	5%	Rp 6.500.000.000	5,50%	
		Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Target	Rp	Target	
		Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	65%	Rp 3.000.000.000	65%	
Bidang Sosial	28	Program Sarana dan Prasarana Logistik	Target	Rp	Target	SKPD BPBD dan Dinas Sosial
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (seal bencana)	85%	Rp 9.246.000.000	100%	
	29	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Target	Rp	Target	
		Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh	75%	Rp 2.523.917.000	80%	
	30	Program Penanggulangan Kemiskinan Teaduu	Target	Rp	Target	
		Persentase Jiwa Keluarga Miskin Yang Menerima Jaminan Layanan Kesehatan (PBI - APBD)	69%		70%	
		Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%	Rp 7.000.000.000	100%	
		Persentase PMKS miskin yang terlayani	100%		100%	
		Persentase Pencaker/ Galkin Yang mendapatkan pelatihan kerja	21%		100%	
		Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	79,20%	Rp 2.541.000.000	79,30%	
Bidang Tenaga Kerja		Program Pemberdayaan Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial	Target	Rp	Target	SKPD Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase PSKS yang telah dibina	50,35%	Rp 665.500.000	50,35%	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Target	Rp	Target	
		Peningkatan ketramplilan/ Skill Pencari Kerja	80%	Rp 1.046.145.000	80%	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Target	Rp	Target	
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22%	Rp 165.897.000	22%	
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Target	Rp	Target	SKPD Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	50%	Rp 376.526.000	50%	
		Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Peminaan Tumbuh Kembang Anak	Target	Rp	Target	SKPD DP3AKB
		'Persentase PUS anggota Poktan yang ber KB (jumlah PUS anggota Poktan Ber KB dibagi jumlah PUS anggota Poktan X 100 %)	85,65,00%	Rp 2.850.000.000	85,70%	
		- BKR	Target	Rp	Target	
		- BKR	70,15%		70,20%	

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD
			Target Kinerja Awal (2020)	Rp		
		- BKL	81,40%		81,43%	
		- UPPKS	84,70%		84,70%	
	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRIR	Prosentase remaja perempuan sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun (jumlah perempuan di bawah 20 tahun yang sudah menikah dibagi jumlah perempuan di bawah 20 tahun X 100%)	0,66%	Rp 600 000 000	0,64%	DP3AKB
	Program Penguatan Kelangkaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Capaian Angka IPG	92	Rp 350 000 000	92	DP3AKB
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)	74,52%	Rp 2 100 000 000	75,01%	DP3AKB
		Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)	64,35%		65,15%	DP3AKB
		Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)	64,35%		65,15%	DP3AKB
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	40%	Rp 1 855 000 000	50%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Peningkatan Kelangkaan Pangan				5 (+- 1)	Sekretariat Daerah
	Program Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	5 (+- 1)		5 (+- 1)	Dinas Sosial
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kelangkaan Pangan	Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima Raskin	100%	Rp 650 000 000	100%	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Lahan	48,27	Rp 19 525 000 000	48,32	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Indeks Pencemaran Udara	93,34	Rp 13 774 676 000	93,84	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penurunan Indeks Pencemaran Air	42,8		43,3	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Informasi Lingkungan yang mudah diakses	100%	Rp 2 222 832 500	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA	61,41%		60,91%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengolahan Sampah di Sumber	24,80%	Rp 80 657 000 000	25,80%	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD	
			Target Kinerja Awal (2020)	Rp			Target
Bidang Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%		100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan Penerbitan KTP elektronik	95%		95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan Penerbitan Aka Kelahiran	89%	Rp 4.700.708.000	90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan penerbitan akta kematian	95%		95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		cakupan kepemilikan kartu identitas anak	85%		85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan di Kelurahan	7%	Rp 2.150.000.000	7,50%	Sekretariat Daerah	
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP dibandingkan Peserta KB Aktif (peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlah peserta KB Aktif X 100 %)	29,51%		30,98%	DP3AKB	
		Persentase DO ber KB (Menurutnya angka kedibberlangsungan pemaknaan kontrasepsi)	12,85%	Rp 2.076.250.000	12,52%	DP3AKB	
		Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang	50%	Rp 25.800.000	67%	Dinas Perhubungan	
		Persentase Pembangunan Koridor E Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	11,11%	Rp 500.000.000	33,33%	Dinas Perhubungan	
Bidang Perhubungan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penyediaan Rambu Jalan	42,30%	Rp 4.200.000.000	47,30%	Dinas Perhubungan	
		Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	92%		100%	Dinas Perhubungan	
		Rasio Penyediaan Jalur Sepeda	90%		90%	Dinas Perhubungan	
		Persentase Zebra Cross dan pla pengaduh untuk zona aman sekolah	30%	Rp 912.200.000	100%	Dinas Perhubungan	
		Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	75%	Rp 2.075.000.000	80%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	13.139 unit	Rp 36.700.000.000	13.439 unit	Dinas Perhubungan	
		Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)	70%		80,00%	Dinas Perhubungan	
		Persentase Fungsi Penerangan Jalan	85%		90%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	13.139 unit	Rp 36.700.000.000	13439 unit	Dinas Perhubungan	
		Persentase yang Terintegrasi dengan SIPKD	1	Rp 6.870.687.000	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Bidang Komunikasi dan Informatika	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif	80,30%	Rp 350.000.000	80,90%	Dinas Koperasi, UMKM dan Usaha Kecil dan

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD
			Target	Rp		
Menengah	Program Pencapaian Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank	36,50%	Rp 200 000 000	36,50%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			60	Rp 450 000 000	300	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah UMKM yang bermita dengan perusahaan Menengah	170 UMKM	Rp 650 000 000	180 UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			6-15	Rp 260 000 000	6-5	Dinas Peranaman Modal dan Perzinan Teadu
	Program Peningkatan, Pengendalian Investasi dan Perzinan	Jumlah Tingkat Kebutuhan Perzinan Peranaman Modal	140	Rp 470 000 000	145	Dinas Peranaman Modal dan Perzinan Teadu
			20%	Rp 700 000 000	25%	Dinas Peranaman Modal dan Perzinan Teadu
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan proses perzinan	SKM pelayanan perzinan	88,8	Rp 2 302 949 000		Dinas Peranaman Modal dan Perzinan Teadu	
		34%	Rp 1 100 000 000	40%	Dinas Peranaman Modal dan Perzinan Teadu	
Bidang Peranaman Modal	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berestasi (orang)	48	Rp 3 100 000 000	50	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
			Bidang Keperudaan dan Olahraga	Program Peningkatan dan Pemasnyarakatan Olahraga	36 Provinsi, 37 Nasional	Rp 10 500 000 000
Bidang Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga			91,10%	Rp 4 259 200 000
			Bidang Peustakaan	Program Pengelolaan Kelestariagaman Budaya	Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan	14
Bidang Keairipan	Program Pelestarian Cagar Budaya	Persentase pelestarian Cagar Budaya yang dilindungi				98%
			Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Peustakaan	Presentase peningkatan kunjungan peustakaan	9%
Bidang Pariwisata	Program Perbaikan Sistem Administrasi Keairipan	Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SKD				50%
			Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Asisp Daerah	Presentase perangkat daerah yang asispnya telah terdata dan tertata	30%
Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan produksi Perikanan	Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)				425,5
			Bidang Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan pemassaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	2 439 740
Bidang Pariwisata	Program Pengelolaan Keanekekaragaman budaya	Peningkatan event Pariwisata dan Budaya				14 Event (luar 4, Dalam 10)

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD	
			Target Kinerja Awal (2020)	Rp			Target
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	36 destinasi	Rp 4.600.000.000		Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	
	Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan	10 obyek wisata	Rp 2.150.000.000		Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	
	Program pengembangan kemiripan	Jumlah asosiasi yang bermitra	9 asosiasi	Rp 400.000.000		Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	
	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1,3	Rp 6.702.260.000	99.697	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
Bidang Pertanian	Program Peningkatan produksi perkebunan	Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	329,75	Rp 4.226.800.000	7.033,80	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Program Peningkatan produksi peternakan	Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	2.637,35	Rp 4.098.672.000	31.911,99	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan unit usaha dagang	130	Rp 900.000.000		Dinas Perdagangan	
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Presentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar	37%	Rp 1.500.000.000		Dinas Perdagangan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Presentase pasar berklasifikasi A	17%	Rp 40.000.000.000		Dinas Perdagangan	
	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Kelentihan dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	Nilai pasar terhadap penilaian adipura	73	Rp 3.046.860.000		Dinas Perdagangan	
Bidang Perindustrian	Program penataan struktur industri	Program peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih (juta dolar)	2.646,50	Rp 323.433.000		Dinas Perdagangan
			Presentase industri eksisting terhadap penzinaan industri di KIK	27%		29%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			Presentase industri eksisting terhadap siapapan SIKS	80%	Rp 51.899.600.000	85%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			Presentase industri eksisting terhadap siapapan SIKT	15%		20%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			presentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	11%		15%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			Presentase Pertumbuhan IKM	0,80%	Rp 5.319.720.000	0,90%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		Program Mengembangkan Kapasitas IP/TEK Sistem Produksi	Presentase IKM menerapkan teknologi industri	23%	Rp 1.265.692.000	25%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Perencanaan	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketelitian data pembangunan dalam SIPD	80%	Rp 5.500.000.000	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD			
			Target Kinerja Awal (2020)	Rp.					
Keuangan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang	75%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
		Persentase keselarasan RIKPD dengan JMD Kota Balikpapan	92,50%	Rp	1.400.000.000	95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
			96%	Rp	2.500.000.000	98%			
		Persentase capaian kinerja RIKPD	40,42%	Rp	3.400.000.000	40,77%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Total Pendapatan Daerah	Rp1.881.997.558.737	Rp	130.000.000		Rp1.904.523.188.679	
		Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%	91,67%	Rp	1.600.000.000	94,44%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			100%	Rp	5.200.000.000	100%			
		Persentase Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD	23%	Rp	5.146.902.500	23,05%	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
			88%	Rp	2.285.970.000	90%			
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	12 Peringkat Daerah			13 Peringkat Daerah	Inspektoriat		
			Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi	77%	Rp	18.744.646.000		100%	
		Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kair ASN	100%			100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	Rp	1.247.866.000		100%	
Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	100%			100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan aparatur	100%	Rp	665.500.000		100%			
Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
		Fungsi Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan							
Kepegawain serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	30%			Sekretariat DPRD			
		Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80%	Rp	28.456.595.000	80%	Sekretariat DPRD		
			Persentase Ketepatan agenda sidang	100%				100%	
		Program Penataan peraturan perundang-undangan	Program Bantuan Hukum	Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	100%	Rp	2.600.000.000	100%	Sekretariat Daerah
				Persentase Perkara yang Ditangani	100%	Rp	1.980.000.000		Sekretariat Daerah

Bidang Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode JMD	SKPD
			TARGET KINERJA AWAL (2020)			
	Program Peningkatan Peran Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	Target	Rp.	Target	Kecamatan
			82%		85%	